

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PESANTREN ASHRI JEMBER DALAM MENOLAK KEBERADAAN HYPERMARKET

Oleh

Nurul Widyawati Islami Rahayu

Dosen STAIN Jember Jurusan Tarbiyah

ABSTRACT

From early establishment of Islamic boarding school was built to take care of and maintain middle-aged Islamic values as a guidance of followers' religious behavior. Generally, Islamic boarding school taughts truthfull, sincereness, and willingness. Those values are the soul of all Islamic boarding school activities, including at Ashri Islamic boarding school, Talangsari Jember. Islamic boarding school which is known as Talangsari female Islamic boarding school always concerns and puts the priority on volunteering and sincereness. All employers in economy section are always obligated to purify intention, volunteering for the Islamic boarding school. Volunteering is identical with working without wanting anything, not calculating the achieving advantage.

Kata kunci: Kebijakan Pesantren, Hypermart

PENDAHULUAN

Sejak awal pesantren didirikan untuk merawat dan melestarikan ilmu-ilmu keislaman abad pertengahan sebagai acuan perilaku keberagamaan umat.¹ Dalam bingkai pelestarian ini pesantren memerankan tiga fungsi konvensional. Pertama, pesantren berfungsi sebagai media transmisi dan transfer ilmu-ilmu keislaman. Penulatan ilmu-ilmu keislaman di pesantren dilakukan dengan berbagai cara yang sudah mentradisi dan khas ala pesantren. Kedua, fungsi pesantren adalah sebagai lembaga yang menjaga dan mempertahankan tradisi Islam. Pada fungsi kedua ini pesantren menjadi semacam 'dapur pengawet' ilmu-ilmu keislaman zaman klasik.²

Buku-buku yang ditulis oleh ulama' salaf (terdahulu) atau yang biasa disebut dengan kitab kuning menjadi 'menu' wajib dalam kurikulum pendidikannya.

Penguasaan terhadap khazanah klasik menjadi ciri khas yang harus dimiliki oleh para santri dan alumni pesantren. Bahkan, minimnya penguasaan terhadap kitab kuning dianggap sebagai santri yang kurang berhasil dalam menimba ilmu dan 'tidak pantas' menyandang status santri. Fungsi pesantren yang ketiga adalah reproduksi ulama'. Pesantren menjadi semacam barometer ketokohan seorang ulama' sekaligus sebagai media 'pencetus' lahirnya ulama' baru. Seberapa banyak dari alumninya yang menjadi panutan di kalangan masyarakat sekitar, maka semakin dipertimbangkan pula posisi pesantren tersebut di mata masyarakat. Para santri di kemudian hari setelah keluar dari pesantren akan mengikuti jejak kiainya dengan mendirikan pesantren di daerah masing-masing setelah mendapat pengakuan dari masyarakat setempat.³

Para alumni ini berperan sebagai 'ulama-ulama' baru jebolan pesantren

¹ Zamakhsyari Dhotier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 43.

² *Ibid.*, hal. 32.

³ *Ibid.*, hal. 67.

sekaligus memperkokoh posisi pesantren asalnya. Oleh karena itu, pesantren berfungsi sebagai 'pabrik' yang memproduksi 'ulama-ulama' baru. Di samping itu, pesantren juga berfungsi sebagai basis institusionalisasi kiai. Dengan mendirikan pesantren, seorang kiai semakin diakui otoritasnya di kalangan masyarakat muslim dibandingkan kiai yang belum mampu mendirikan pesantren. Masyarakat muslim akan mengkonsepsikan sebagai tokoh kharismatik terhadap kiai yang mengasuh pesantren besar dengan ribuan santri yang berjibun.⁴

Jumlah kuantitatif santri akan berpengaruh terhadap ketokohan dan kharisma seorang kiai di mata masyarakat umum. Kebesaran dan ketenaran pesantren menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat luas untuk menyerahkan putra-putri mereka menjadi anak asuh.⁵ Karena itulah, pesantren dengan tokoh kiaiinya menduduki posisi penting di tengah masyarakat Muslim. Bahkan, peran kiai menjangkau batas wilayah di luar keagamaan. Otoritas mereka terkadang menyentuh wilayah-wilayah 'duniawi' yang sebenarnya tidak mempunyai hubungan paralel dengan (pendidikan) agama yang menjadi bidang garapannya. Oleh karena itu, berbagai istilah muncul yang dialamatkan kepada kiai dengan berbagai peran yang dimainkannya. Begitu pentingnya peran dan posisi kiai di tengah-tengah masyarakat Muslim, hingga seorang peneliti Clifford Getz menyematkan sebutan "pialang budaya/makelar budaya" (*cultural broker*) bagi tokoh yang satu ini.⁶

Akan tetapi, hal yang paling penting dari semua peran tersebut adalah kiprah

pesantren dalam dunia pendidikan. Peran dalam pendidikan ini sangat sentral, mengingat melalui wilayah inilah khususnya pesantren dan kiai menjalankan peran utamanya sebagai perumus pola hidup keberagamaan masyarakat. Melalui pesantren, kiai bertindak sebagai 'penerjemah' doktrin-doktrin keislaman yang menjadi acuan masyarakat awam.

Di zaman yang serba modern, lembaga dengan label tradisional ini tetap kokoh dan terbukti eksis bertahan meskipun harus melakukan pembenahan di sana-sini. Tantangan demi tantangan dalam perjalanan sejarahnya, terutama pada awal menapaki abad 20 di mana kaum reformis atau modernis muslim menuntut perubahan sistem dalam pendidikan Islam, mampu dihadapi pesantren dengan berbagai penyesuaian, sehingga keberadaannya tetap dipertimbangkan dan eksis hingga sekarang.

Terlepas dari lintasan sejarah dengan berbagai perubahan di dalamnya, terbukti pesantren tetap bertahan 'menantang' gilasan zaman. Terdapat tiga kekuatan yang menjadi penopang mengapa pesantren tetap eksis sampai saat ini. Pertama, kekuatan tradisi keilmuannya yang sangat kokoh dalam mempertahankan warisan ulama' terdahulu (*turats*) yang tersebar dalam lembaran-lembaran kitab kuning. Kesetiaan terhadap warisan itulah yang pada gilirannya akan membentuk kharisma kiai. Tidak sedikit kajian-kajian literatur yang menjadi 'santapan' sehari-hari di pesantren mengharuskan penghormatan khusus dan terkadang berlebihan terhadap sosok kiai. Salah satunya adalah kitab *Ta'limul Muta'allim* yang menjadi pegangan wajib santri hampir di semua pesantren. Tidak hanya itu, faktor lain yang ikut menyumbang asupan kharisma adalah pribadi-pribadi alumninya yang mempunyai kedudukan terhormat di mata masyarakat.⁷

⁴ Irwan Abdullah (ed.), *Agama, Pendidikan Islam, dan Tanggungjawab Sosial Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 10.

⁵ Babun Suharto, *Dari Pesantren Untuk Umat*, (Surabaya: IMHYAZ, 2011), hal. 43.

⁶ *Ibid.*, hal. 77.

⁷ Khusnuridlo, *Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global*, (Jogjakarta:

Dua hal tersebut satu sama lain saling menopang dalam pembentukan citra kharisma. Kedua, adanya pengikut dan kepercayaan dari masyarakat melalui pengiriman santri untuk belajar di pesantren. Pilar yang kedua ini sebagai konsekuensi dari yang pertama, mengingat kharisma menjadi 'magnet' yang mampu menyedot kepercayaan masyarakat terhadap sosok seorang tokoh. Bisa dibayangkan jika tidak ada kepercayaan dari masyarakat, lambat laun jumlah santri akan menurun. Penurunan jumlah kuantitas santri akan mengancam eksistensi pesantren ke depan. Lalu, pada akhirnya akan menyebabkan pesantren 'gulung tikar'. Pilar ketiga yang menjadi kekuatan penopang pesantren tetap eksis hingga sekarang dikarenakan faktor pendanaan yang terus mengalir ke pondok pesantren. Faktor yang terakhir ini menjadi tonggak keberlangsungan hidup pesantren, meskipun dua faktor sebelumnya bukan berarti diabaikan. Ketiga kekuatan tersebut tentu saling terkait satu sama lain, namun faktor terakhir menjadi kekuatan penentu geliat nafas kehidupan bagi pesantren. Eksistensi dan keberlanjutan pesantren ditentukan oleh faktor ketiga ini.

Oleh karena itu, pesantren dituntut untuk membiayai dirinya agar tetap eksis. Tentu harus didukung dengan strategi-strategi jitu agar dapat menghidupi segala proses yang berlangsung di dalamnya. Pendek kata, pesantren harus melakukan penataan dan manajemen ekonomi secara proporsional agar menjadi mesin penggerak yang efektif dan efisien. Akan tetapi, penataan serta pengelolaan ekonomi haruslah berangkat dari suatu pijakan dan konsep yang menjadi landasan bertumpu. Beranjak dari titik pijak ini segala aktivitas ekonomi digerakkan dan dipantulkan dalam tataran praksis. Corak serta model pengembangan sektor ekonomi sangat tergantung pada pilihan ideologi, disadari

Laksbang, 2006), hal. 21.

ataupun tidak, yang menjadi penggerak. 'Landasan bertumpu' inilah yang sering kita sebut dengan spirit, atau dalam bahasa sederhana diungkapkan dengan kata 'semangat'. Idealnya, spirit harus selalu mengiringi dan menjadi ruh dalam setiap tindakan. Spirit harus mengejewantah dalam perbuatan kongkret. Pada titik ini sinkronisasi spirit dengan tindakan nyata dibutuhkan. Ketersambungan dan kerjasama dialektis antara spirit dan tindakan akan menjadi kekuatan manajerial. Oleh karenanya, dalam konteks kegiatan ekonomi keberadaan spirit menjadi penting guna menentukan suatu keberhasilan. Tesis Weber tentang etika Protestan yang menjadi semangat berkembangnya ekonomi bercorak kapitalis merupakan pembenar betapa sebuah kebijakan sangat menentukan.⁸

Pada umumnya pesantren selalu menanamkan nilai-nilai ketulusan, keikhlasan, dan suka rela.⁹ Nilai tersebut boleh dikatakan menjwai hampir semua aktivitas pesantren. Tidak terkecuali Pondok Pesantren Ashri Talangsari Jember. Pesantren yang lebih dikenal dengan sebutan Pesantren Putri Talangsari ini dalam kegiatan ekonominya selalu menekankan dan mengedepankan pengabdian dan keikhlasan. Para (santri) karyawan di sektor perekonomian selalu dituntut untuk memurnikan niat, mengabdikan pada pesantren. Pengabdian identik dengan bekerja tanpa pamrih, tidak memperhitungkan keuntungan yang akan diperoleh.

Makna pengabdian selalu berdampingan dengan sikap ikhlas. Pengabdian dan keikhlasan idealnya merupakan spirit yang positif. Keduanya merupakan pekerjaan hati yang tak bisa

⁸ Max Weber, *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, terj. Yusup Priyasudiarja (Surabaya: Pustaka Prometheus, 2003), hal. 33.

⁹ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. (Ciputat: INIS, 1994), hal. 55.

dijangkau panca indra. Namun, spirit ini akan terlihat dalam kerja konkret, tindakan nyata. Di samping itu, Pondok Pesantren Ashri Talangsari Jember mencoba untuk tidak mengadopsi kegiatan ekonomi modern, dengan tidak beranjak meninggalkan sumber ekonomi yang mengandalkan pertanian atau ekonomi agraris sebagaimana pesantren pada awal berdirinya. Pada masa awal sumber ekonomi pesantren bertumpu pada hasil panen pertanian, sebab kiai pada umumnya adalah golongan menengah kaya dan memiliki tanah.

Dengan bertambahnya kebutuhan pesantren yang semakin kompleks, mengandalkan ekonomi pertanian tentunya tidak lagi memadai. Namun pemangku kebijakan Pondok Pesantren Ashri Talangsari masih tetap *survive* dengan pola pikir lama. Fenomena yang terjadi di bidang kebijakan pesantren ini adalah menolak berdirinya keberadaan *Hypermarket* atau toko modern yang lagi menjamur di Kabupaten Jember. Banyak kalangan yang terkejut dengan berdirinya *Hypermarket* di area kompleks sekitar pesantren tersebut sehingga melakukan sebuah aksi penolakan yang dipimpin oleh pemangku kebijakan Pondok Pesantren Ashri Talangsari (Gus Saif). Toko Modern yang oleh aktivis sosial diidentikkan sekaligus menjadi icon ekonomi kapitalis saat ini merambah lingkungan pesantren.

Ada apa dengan kebijakan pesantren? Jiwa pengabdian dan keikhlasan yang selalu ditanamkan dalam realita praktiknya akankah menumbuhkan ekonomi bercorak elit, tidak merakyat. Pesantren yang penuh nilai-nilai kesederhanaan seolah bertolak belakang dengan kemegahan dan kementerengan tampilan *Hypermarket*. Oleh karena itu, sebagai pesantren yang sudah terlanjur diklaim penuh kharismatik, mencoba tetap survive dengan gerakan penolakan berdirinya *Hypermarket* yang sudah melalui tahap pembangunan gedung

Hypermarket. Pemangku kebijakan (Kyi) dalam hal ini mencoba melakukan aksi protes ke pendopo Kabupaten untuk menunjukkan penolakan terhadap berdirinya *Hypermarket*. Namun diketahui belakang hari aksi tersebut yang semula di dukung oleh warga sekitar Pondok Pesantren Ashri Talangsari Jember berubah menjadi aksi pendukung terhadap berdirinya *Hypermarket* di lingkungan Pondok Pesantren Asri Talangsari Kabupaten Jember.

Dukungan warga yang semula diberikan sepenuhnya pada pemangku kebijakan Pondok Pesantren Ashri Talangsari Jember berubah dengan perkembangan waktu menjadi mendukung berdirinya *Hypermarket* di lingkungan Pondok Pesantren Ashri Talangsari Jember. Hal inilah yang menarik untuk dijadikan sebuah penelitian. Fenomena kegigihan dan keuletan pemangku kebijakan Pondok Pesantren Ashri Talangsari Jember untuk melakukan aksi penolakan terhadap berdirinya *Hypermarket* menjadi sentra utama dari penelitian ini. Di samping itu faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pesantren dalam melakukan penolakan terhadap berdirinya *Hypermarket* akan diuraikan juga dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif, peneliti bermaksud mendeskripsikan atau memperoleh gambaran tentang *Kebijakan Pesantren dalam Menolak Berdirinya Hypermarket (Giant) di Pondok Ashri Talangsari Kabupaten Jember*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif fenomenologis. Pendekatan fenomenologis digunakan selain untuk tujuan mendeskripsikan peristiwa sosial, mengungkapkan peristiwa-peristiwa riil di lapangan, juga dapat mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi (*hidden value*), serta

lebih peka terhadap informasi-informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan obyek yang diteliti.

Penelitian dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tertentu. Fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti. Inkuiri fenomenologis dimuali dengan diam. Diam merupakan tindakan untuk menangkap pengertian sesuatu yang sedang diteliti.¹⁰

Implementasi Kebijakan Menolak *Hypermarket*

Implementasi kebijakan bukan sekedar mekanisme penjabaran dari keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, akan tetapi lebih luas lagi berkaitan dengan masalah-masalah konflik, keputusan terkait dengan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan. Sehingga tidak salah jika implementasi dikatakan merupakan aspek terpenting dari keseluruhan kebijakan. Implementasi kebijakan dimaknai sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan baik eksekutif maupun legislatif).

Dari hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya sebatas tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku administratif atau birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari kelompok sasaran. Namun perlu diperhatikan bahwa kebijakan Pesantren Ashri dalam menolak berdirinya *hypermarket* (Giant) Talangsari Jember

merupakan tindakan dari pihak-pihak terkait dengan pemecahan masalah yang timbul dari fenomena sosial.

Untuk konteks Jember, dalam rangka mengikuti laju globalisasi ekonomi, maka waralaba atau toko modern atau *hypermarket* perlu disemarakkan. Bupati berasumsi bahwa semakin banyak berdirinya waralaba atau *hypermarket* maka semakin menambah pemasukan kas daerah. Bupati menyangkal jika keberadaan toko modern dapat memarjinalkan toko kelontongan, justru toko modern dapat dijadikan tempat grosir bagi toko kelontongan.

Berdirinya *Hypermarket* di Talangsari merupakan salah satu agenda Bupati Jember dalam mengikuti arus globalisasi. Ada beberapa tim yang terkait dengan pendirian *hypermarket* (Giant) yang masuk ketagori tim klarifikasi diantaranya; Disperindag, Dinas Pariwisata, Bakesbang, Dinas PU Cipta Karya, Dinas KLH, Dishub, Kasat Lantas, Komisi D DPRD. Yang termasuk tim peduli warga talangsari anatar lain: pemangku kebijakan Pondok Pesantren Ashri Talangsari, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan warga sekitar.

Pendirian *Hypermarket* itu, tak pelak, menimbulkan reaksi dari sejumlah kalangan, khususnya masyarakat Talangsari ayng dimotori oleh Pengasuh Pesantren Ashri, Gus Saif. Penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) yang dilakukan oleh pemangku kebijakan Pondok Pesantren Ashri Talangsari Kabupaten Jember tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa:

- a. Keberadaan *hypermarket* (Giant) di lahan pabrik es sangat dikhawatirkan akan mencemari akhlaq warga lingkungan Talangsari yang sejak zaman dulu telah di kenal sebagai kawasan religius.
- b. Kepadatan lalu lintas Talangsari yang saat ini melampaui ambang batas, akan

¹⁰ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (PT. Remaja Rosdakarya: Bandung, 2006), hal. 17.

- semakin parah oleh hadirnya pengunjung *hypermarket* (Giant)
- c. Proses sosialisasi dan permohonan penerbitan ijin *hypermarket* (Giant) Talangsari tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - d. Bangunan pabrik es yang dibangun tahun 1913 seyogyanya dilestarikan dan digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan cagar budaya
 - e. *Hypermarket* (Giant) itu sudah tidak mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Indonesia. Nilai-nilai ekonomi yang dibangun oleh Indonesia juga tidak ada. Apalagi ada penelitian-penelitian yang menyatakan tentang berdirinya minimarket telah mematikan usaha kecil di sekitar minimarket tersebut.

Mekanisme Penolakan Berdirinya *Hypermarket* (Giant)

No.	Tanggal Pelaksanaan	Uraian Kegiatan
1.	24 Maret 2013	Info awal rencana pendirian <i>hypermarket</i> (Giant) di Talangsari: 3 Kepala dinas Pemkab Kabupaten Jember (Disperindag, Pariwisata dan Bakesbang) datang menemui Pimpinan Pondok Pesantren Ashri Talangsari (Gus Saif) dan menyampaikan informasi adanya rencana pendirian <i>hypermarket</i> (Giant) di lahan pabrik es Talangsari yang dimiliki PT. Panca Wira Usaha, BUMD Pemprov Jatim.
2.	03 April 2013	Pengumpulan tanda tangan 150 warga Talangsari dilakukan secara seumbunyi-sembunyi oleh pihak <i>hypermarket</i> (Giant) dengan menandatangani surat persetujuan tertulis atas berdirinya <i>hypermarket</i> (Giant) di Talangsari dengan imbalan Rp. 500.000 untuk setiap tanda tangan.
3.	25 April 2013	Pemangku Kebijakan Pondok Pesantren Ashri (Gus Saif) menolak rencana tersebut dengan pertimbangan: a) keberadaan (kegiatan konsumerisme dari supermarket) Giant di lahan pabrik es nantinya sangat mengawatirkan karena akan mencemari akhlak dan perilaku warga lingkungan Talangsari yang sejak zaman dahulu telah dikenal sebagai warga atau kawasan yang religius; b) kepadatan lalu lintas Talangsari yang saat ini telah melampaui ambang batas, akan semakin parah oleh hadirnya pengunjung <i>hypermarket</i> (Giant); c) jarak lokasi <i>hypermarket</i> (Giant) terlalu dekat (500 m) dengan lokasi pasar tradisional (pasar Tanjung) yang dikhawatirkan akan mengurangi omzet pedagang pasar tradisional; d) proses sosialisai dan permohonan dan penerbitan ijin <i>hypermarket</i> (Giant) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e) bangunan pabrik es yang di bangun tahun 2013 seyogyanya dilestarikan atau di gunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan cagar budaya; f) Gus Saif tidak menolak berdirinya <i>hypermarket</i> (Giant), asal bukan di lahan pabrik es Talangsari.
4.	30 April 2013	Bangunan pabrik es dibongkar.
5.	02 Mei 2013	Raker bersama digelar pertama kali dengan aksi menolak rencana pendirian <i>hypermarket</i> (Giant), menghasilkan; a)

		Gus Saif dan tim warga peduli melakukan aksi demo penolakan rencana pendirian <i>hypermarket</i> (Giant) di kantor Desperindag dan Dinas KLH Pemkab Jember; b) Komisi D DPRD Jember melakukan <i>hearing</i> bersama Ka. Disperindag, Ka. Dinas PU Cipta Karya, Dinas KLH, Kasat Lantas dan Dishub dengan notulen (1; semua Ka. Dinas (termasuk Bupati) menyatakan belum mengetahui adanya proses permohonan ijin rencana pendirian <i>hypermarket</i> (Giant) di Talangsari, 2; pendirian <i>hypermarket</i> (Giant) Talangsari harus memenuhi syarat amdal atau melalui kajian akademis yang menjadi syarat dalam menertibkan ijin mendirikan bangunan (IMB), 3; Kasat Lantas menggambarkan bahwa sikon lalu lintas dikawasan tersebut sudah sangat padat tidak layak, terlebih lagi jika aka nada tambahan beban dari <i>hypermarket</i> (Giant), 4; Komisi D menyatakan menolak pendirian <i>hypermarket</i> (Giant) di Talangsari dan akan menyampaikan penolakan tersebut ke PEMPROV Jatim); c). ketua komisi D turun ke bawah ke pabrik es Talangsari dan memerintahkan Manager untuk menghentikan kegiatan pembongkaran bangunan.
6.	13 Mei 2013	Ketua komisi D Jember melapor ke komisi C PEMPROV Jatiim dan hasil tindak lanjutnya adalah: a); komisi C menolak rencana berdirinya <i>hypermarket</i> (Giant) di Talangsari <i>hypermarket</i> (Giant) dan mendesak Dirut PT. Panca Wira Usaha (yang membawahi pabrik es Talangsari) untuk membatalkan MOU penyewaan lahan kepada <i>hypermarket</i> (Giant) dan Dirut pada saat itu menyatakan batal; b). Komisi C akan berkoordinasi dengan DPRD Jember.
7.	15 Juli 2013	Bupati menerbitkan surat klarifikasi lokasi rencana <i>hypermarket</i> (Giant) di lahan pabrik es Talangsari berdasarkan; a) surat permohonan direktur <i>hypermarket</i> (Giant) kepada Bupati Jember tanggal 13 Maret 2013 dan di acc Bupati untuk ditindaklanjuti tanggal 16 April 2013, dan juga rekomendasi pertimbangan teknis kantor BPN Jember tertanggal 10 Juni 2013.
8.	26 Agustus 2013	Ada kegiatan pembangunan di lahan pabrik es yang berupa pembongkaran, pembersihan dan pembuatan pagar.
9.	29 Agustus 2013	Tim PEMPROV Jatim (utusan Gubernur) datang ke Gus Saif untuk melakukan wawancara dalam rangka mengklarifikasi surat Gus Saif yang dikirimkan ke Gubernur Jawa timur, dan tim tersebut berjanji akan mempertemukan semua pihak terkait dalam sebuah forum PEMPROV.
10.	5 September 2013	Raker bersama kedua di gelar kembali yang mengundang adalah komisi D DPRD yang ditulis dalam sebuah notulen yang berisi; a) ketua komisi D (Ayub) membuka raker bersama tepat jam 10.20 yang ditetapkan sebagai forum

		<p>penampung aspirasi, informasi atau masukan, b) Hanif perwakilan dari Pondok pesantren ASRHI menyampaikan maaf karena Gus Saif tidak bisa hadir namun yang bersangkutan menugaskan teman dari FKLSM untuk mewakili Ashri, c) Hafidi (anggota komisi D) interupsi untuk menunda raker karena ada pihak yang tidak hadir yaitu Gus Saif, namun interupsi tersebut ditolak oleh ketua sidang dengan asumsi bahwa forum ini tidak untuk mengambil keputusan namun untuk menampung informasi atau masukan, d) Kustiono dari pihak Pondok Pesantren Ashri mengusulkan agar menghadirkan investor, agar forum tidak terkesan konflik antar warga dan pemerintah daerah, e) Ketua Komite dari SD Al-Furqon menyatakan bahwa berdasarkan musyawarah wali murid dan warga lingkungan SD Al-Furqon menyatakan menolak berdirinya <i>hypermarket</i> (Giant) karena banyak menimbulkan dampak negatif (sosial, ekonomi, pendidikan dan lingkungan), f) Tito dari Ka DKLH menyampaikan bahwa telah menerbitkan HO pada tanggal 17-08-2013 karena telah memenuhi syarat (ada ijin lokasi Bupati, BPN dan persetujuan tertulis dari banyak warga sekitar, g) dari Ka PU Cipra Karya (Merwin) memberikan bukti tentang penerbitan IMB tgl 31-08-2013 karena telah memenuhi syarat, h) dinas perhubungan (Putu Budiade) mengungkapkan bahwa belum pernah ada pembahasan atau penerbitan amdal alin, padahal hal tersebut merupakan syarat yang wajib dipenuhi sebelum menerbitkan izin IMB, HO dan lain nya. Di samping itu amdal lalin harus dibuat oleh lembaga yang memiliki sertifikasi yang berkompenten begitu lanjutnya, i) Atang Suparta dari perwakilan Polres mengatakan bahwa situasi lingkungan dan kondisi lebar jalan yang hanya 6 m yang tidak memenuhi syarat berdirinya toko modern dan mengkhawatirkan timbulnya dampak <i>social negative</i> jika pembangunan tetap dilanjutkan, j) salah satu anggota DPRD komisi D (Gafur) menyayangkan keangkutan sikap bupati yang menerbitkan ijin prinsip <i>hypermarket</i> (Giant) padahal mekanismenya harus melalui tahapan amdal alin dahulu dan berharap DPRD mampu meluruskan masalah ini.</p> <p>Dalam raker tersebut telah dicatat semua informasi dan masukan untuk ditindaklanjuti pada raker yang akan datang, yaitu pada hari senin tanggal 9 september 2013.</p>
<p>11.</p>	<p>9 September 2013</p>	<p>Raker bersama ketiga digelar kembali yang menghasilkan; a) Gus Saif menyampaikan penolakan atas pendirian <i>hypermarket</i> (Giant) dilahan pabrik es dengan alas an berdampak negative bagi pendidikan dan lalu lintas di jalan KII. Siddiq (amdal lalin belum dipenuhi); b) Sekab menjelaskan bahwa ijin Bupati hanya berupa klarifikasi ijin</p>

		lokasi yang masih harus dilengkapi oleh pihak <i>hypermarket</i> (Giant) dengan ijin-ijin lain yang sesuai peraturan yang berlaku, c) direktur <i>hypermarket</i> (Giant) menyatakan batal membangun atau mendirikan <i>hypermarket</i> (Giant) di Talangsari karena ada penolakan dari Gus Saif. Selanjutnya komisi D menerbitkan berita acar pernyataan direktur <i>hypermarket</i> (Giant).
12.	10 September 2013	Warga Talangsari yang berubah haluan menjadi pendukung berdirinya <i>hypermarket</i> (Giant) di Talangsari mendatangi gedung DPRD Jember untuk menyampaikan aspirasinya, namun tidak bertemu dengan anggota dewan karena semua anggota DPRD sedang mengadakan workshop di Batu Malang. Untuk menghilangkan rasa kecewa karena tidak bertemu dengan anggota dewan maka masyarakat menuju Radio Prosalina dan menyampaikan aspirasinya melalui acara "dobrak" radio Prosalina dengan mengungkapkan bahwa; a) mayoritas warga Talangsari telah menyetujui pendirian <i>hypermarket</i> (Giant), sedangkan yang menolak hanya satu warga dan LSM yang bukan warga Talangsari, b) masyarakat pro pendirian <i>hypermarket</i> (Giant) ini menganggap keberadaan <i>hypermarket</i> (Giant) akan dapat meningkatkan perekonomian lingkungan dan menyerap tenaga kerja dari warga.
13.	7 Oktober 2013	Diadakan raker bersama ke empat namun karena tidak kuorum maka ditutup dan diputuskan untuk diundang kembali tanggal 10 oktober 2013.
14.	10 Oktober 2013	Raker bersama ke lima digelar kembali dengan menampung aspirasi warga yang menolak dan komisi D akan membahas secara internal dan mengusulkan hak-hak anggota DPRD ke rapim DPRD.
15.	11 Oktober 2013	Wakil DPRD Jember (Ulum) mengatakan di media bahwa menolak usulan komisi D menggunakan hak-hak DPRD atas ketidakhadiran eksekutif dalam 2 kali raker dan Ulum menyarankan agar warga menggugat Bupati di pengadilan.
16.	17 Oktober 2013	Polres menghimbau pembangunan <i>hypermarket</i> (Giant) dihentikan sementara dan akan menyurati Bupati untuk membentuk forum lain.
17.	19 Oktober 2013	Kepala BAKESBANG menggelar pembahasan amdal lain 10 oktober 2013 di pendopo kelurahan Jember kidul yang dipimpin kepala BAKESBANG Pemkab Jember dengan dihadiri Camat Kaliwates, lurah Jember Kidul dan warga pro <i>hypermarket</i> (Giant).
18.	22 Oktober 2013	Gus Saif mendesak Ka. PU Cipta Karya mencabut IMB <i>hypermarket</i> (Giant) karena tidak sesuai dengan pernyataan direktur <i>hypermarket</i> (Giant) yang akan tidak memulai pembangunan jika situsai tidak kondusif dan Ka Dinas menindaklanjuti desakan Gus Saif dengan cara menyurati

		Direktur <i>hypermarket</i> (Giant).
19.	23 Oktober 2013	Bupati meminta warga menolak keberadaan <i>hypermarket</i> (Giant) melalui pengadilan karena beliau telah menerbitkan ijin pendirian <i>hypermarket</i> (Giant) telah sesuai ketentuan yang berlaku.
20.	25 Oktober 2013	Gus Saif melaporkan direktur <i>hypermarket</i> (Giant) atas kebohongan publik dalam pernyataannya “menghentikan pembangunan <i>hypermarket</i> (Giant) di Talangsari yang pernah disampaikan dalam raker.

Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan penolakan berdirinya Hypermarket

Menurut Edwards, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: 1) komunikasi, 2) sumberdaya, 3) disposisi dan 4) struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain.¹¹

Faktor Komunikasi

Keberhasilan implementasi menyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Dalam hal ini merupakan tugas pemangku kebijakan Pondok Pesantren Ashri Talangsari Jember. Komunikasi dalam hal ini adalah implementasi kebijakan penolakan berdirinya *hypermarket* di wilayah Pondok Pesantren Talangsari Jember. Sedangkan keseluruhan informasi tentang penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) tertuang dalam aksi demo yang disampaikan di depan pendopo bupati pada tanggal 25 Maret 2013.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa sifat informasi penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) di wilayah Pondok Pesantren Talangsari Jember ini tidak mengikat seluruh elemen masyarakat faham atau mengetahui tentang penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) di dekat area Pondok Pesantren Ashri Talangsari Jember. Sedangkan konsistensi informasi ini dinilai peneliti tidak konsisten, karena

informasi yang diperoleh bagian Pondok Pesantren dengan masyarakat sekitar tidak sama. Atas dasar resume informasi tentang eksistensi indikator faktor komunikasi tersebut, maka dapatlah dikemukakan bahwa faktor komunikasi kebijakan Pondok Pesantren Ashri Talangsari dalam penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) berjalan tidak baik.

Faktor Sumber-sumber

Sumber daya merupakan pelaksana dari implementasi, dapat berwujud sumber daya manusia, informasi, wewenang dan fasilitas. Yang dimaksud dengan sumber daya manusia dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mendukung terhadap penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) dan yang tergabung dalam kelompok peduli warga. Yang dimaksud informasi dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana kinerja pemangku kebijakan Pondok Pesantren Ashri Talangsari dan kelompok peduli warga dalam melaksanakan penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant). Wewenang yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu hak dari masing-masing dinas yang tergabung dalam Tim Klarifikasi untuk melaksanakan tugasnya, misalnya dinas DISPERINDAG yang menertibkan ijin mendirikan bangunan (IMB) *hypermarket* (Giant). Sedangkan fasilitas yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain upaya-upaya yang dilakukan dalam mempersiapkan implementasi penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) di Talangsari, antara lain seperti mengajukan surat ke

¹¹ Edwards, *Analisis Kebijakan Publik*, (PT Harindita, Yogyakarta, 2003), hal. 105.

PEMPROV Jatim dan menyiapkan dokumen-dokumen pendukung seperti pasal-pasal pendirian toko modern.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan berkaitan dengan masalah sumber-sumber antara lain disampaikan oleh Dinas POLRES dan Anggota Komisi D sebagai berikut. Dinas POLRES, yang diwakili oleh Bapak Atang Suparta, Kabag OP. Satlantas yang merupakan salah satu anggota dari Tim Klarifikasi mengatakan:

”berdasarkan Undang-undang (UU) dan peraturan perundangan (PP), Amdan lalin merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi sebelum menerbitkan ijin-ijin yang lain. Dan rencana pembangunan *hypermarket* (Giant) Talangsari belum memiliki amdal lalin. Di samping itu situasi lingkungan dan kondisi lebar jalan sepanjang Talangsari (KH Sidiq) hanya berukuran 6 M sehingga jelas tidak memenuhi syarat untuk mendirikan sebuah toko modern.”¹²

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Dinas Perhubungan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Putu Budiade: “Selama ini belum pernah ada pembahasan atau penerbitan amdal lalin, padahal hal tersebut merupakan syarat yang wajib dipenuhi sebelum menerbitkan izin IMB, HO dan lain-lain.”¹³

Komisi D DPRD yang di wakili oleh Drs. Gafur memberikan statemen sebagai berikut: ”Saya sangat menyayangkan sikap bapak Bupati yang *keuh-keuh* terhadap proses pendirian dan penerbitan ijin *hypermarket* (Giant), saya juga sangat berharap DPRD mampu meluruskan masalah administrasi dari sang

penguasa kabupaten.”¹⁴

Di samping itu komisi D DPRD juga telah melakukan *hearing* bersama dengan Ka. Disperindag, Ka. Dinas PU Cipta Karya, Dinas KLH, Kasat Lantas dan Dishub dengan notulen:

”Semua Ka. Dinas menyatakan belum mengetahui adanya proses proses permohonan ijin rencana pendirian *hypermarket* (Giant) Talangsari, Kasat Lantas menggambarkan bahwa situasi dan kondisi lalu lintas di kawasan KH Shidiq sudah sangat padat dan tidak layak, terlebih lagi jika akan ada tambahan beban dari kegiatan *hypermarket* (Giant) dan komisi D menyatakan menolak pendirian *hypermarket* (Giant) di Talangsari dan akan menyampaikan penolakan tersebut ke pemerintah Provinsi Jawa Timur.”¹⁵

Dengan hasil *hearing* tersebut maka ketua komisi D meninjau pabrik es Talangsari dan memerintahkan Manager untuk menghentikan kegiatan pembongkaran bangunan *hypermarket* (Giant) Talangsari.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa tenaga pelaksana yang meliputi semua Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang tergabung dalam Tim Klarifikasi dan Peduli Warga Talangsari tergolong cukup lengkap dan kualitasnya pun cukup baik, artinya untuk menjalankan kebijakan. Penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) Talangsari dipandang mampu oleh peneliti walaupun harus bekerja sama dengan instansi atau organisasi masyarakat (LSM) lain yang terkait.

Untuk melakukan implementasi kebijakan Pondok Pesantren ASRIII dalam

¹² Wawancara Bapak Suparto, 25 Oktober 2013.

¹³ Wawancara Bapak Putu Budiade, 25 Oktober 2013.

¹⁴ Wawancara Bapak Drs. Gafur, 1 Nopember 2013.

¹⁵ Wawancara 1 Nopember 2013

hal penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) di Talangsari dari masing-masing personal sudah mengetahui tugas pokok (TUPOKSI) yang disesuaikan dengan tugas dari Tim Klarifikasi dan Tim Peduli Warga Talangsari.

Sumber dana untuk implementasi kebijakan Pondok Pesantren ASRHI dalam hal penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) di Talangsari adalah selain dari anggaran pribadi pemangku kebijakan Pondok Pesantren ASRHI Talangsari juga dari warga pendukung dan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) Kondisi riil di lapangan (obyek penelitian), peneliti kesulitan mendapatkan data mengenai berapa jumlah kisaran sumber pendanaan, hal ini disebabkan karena sistem sukarela yang ada.

Berdasarkan diskripsi indikator variabel sumber-sumber di atas, dapatlah dikemukakan bahwa kualifikasi sumber daya secara umum tergolong kurang baik. Hanya jumlah dan kualitas sumber daya pelaksana saja yang mendukung implementasi kebijakan penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) di Talangsari tersebut, namun jumlah dana dan kecukupan sarana dan prasarana masih kurang mendukung implementasi kebijakan.

Faktor Disposisi atau Kecenderungan-kecenderungan

Disposisi atau kecenderungan-kecenderungan yang berkaitan dalam implementasi kebijakan Pondok Pesantren Ashri dalam hal penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) di Talangsari adalah komitmen dan keseriusan dari masing-masing tim yang sudah masuk dalam Tim Klarifikasi dan Tim Peduli Warga Talangsari.

Melalui beberapa dinas maka akan diketahui bagaimana komitmen dan keseriusan mereka dalam implementasi kebijakan Pondok Pesantren Ashri dalam

hal penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) di Talangsari.

Faktor Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Dua karakteristik utama dari birokrasi, yaitu 1) Standard Operating Procedures (SOP). Dalam penelitian ini yang dimaksud SOP adalah prosedur langkah-langkah implementasi kebijakan. Dasar Hukum Utama Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dan juga berdasar rancangan Perda No. 00 Tahun 2012 pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan Kabupaten Jember.

Struktur birokrasi yang berkarakteristik *Standard Operating Procedures* (SOP) cukup baik karena tersedianya sumber-sumber yang diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan Pondok Pesantren Ashri dalam hal penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) di Talangsari. Akan tetapi dukungan aparat pelaksana dan dinas terkait tergolong kurang baik. Fenomena yang mendorong pada penilaian tersebut terbukti sampai tahun saat ini atau saat penelitian ini selesai pembangunan *hypermarket* (Giant) di Talangsari sudah masuk tahap *finising* dan akan *dilaunching* pada akhir bulan Desember 2013.

Sedangkan karakteristik yang kedua dari struktur birokrasi yaitu fragmentasi. Pada kenyataannya fragmentasi terjadi antara dinas terkait yang masuk dalam Tim Klarifikasi dan Tim Peduli Warga Talangsari kurang mendukung implementasi kebijakan Pondok Pesantren Ashri dalam hal penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) di Talangsari. Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dikemukakan bahwa faktor struktur

birokrasi ini tergolong kurang baik.

Oleh karena kebijakan pemerintah melibatkan kepentingan banyak orang (*public interest*), maka hendaknya setiap kebijakan pemerintah daerah yang dibuat harus dapat membawa manfaat dan keuntungan bagi banyak orang, baik yang terlibat langsung maupun tidak. Agar supaya kebijakan pemerintah dapat memenuhi apa yang menjadi tuntutan (*demands*), kepentingan umum (*public interest*), dan mendapat dukungan (*support*), serta sumber-sumber (*resources*) untuk menunjang tuntutan tersebut, maka kebijakan negara harus dibuat sebaik mungkin, dan perlu mendapat pengkajian yang cermat dan seksama, pada setiap tahapan dalam proses kebijakan negara (*public policy process*).

Dalam studi kebijakan negara, dikemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu studi yang bersifat "crucial" dalam studi administrasi dan kebijakan negara, dalam arti bagaimanapun baiknya implementasi, apabila tidak didahului dengan adanya suatu rencana yang baik, maka akan diperoleh hasil yang kurang sesuai dengan yang diharapkan. Demikian juga sebaliknya, walaupun adanya suatu rencana kebijakan yang baik, tetapi tidak diikuti dengan tindak lanjut yang baik, maka juga tidak akan bisa dicapai hasil yang diharapkan. Dengan demikian, bila menginginkan suatu kebijakan agar dapat mencapai hasil yang diharapkan, maka dituntut adanya suatu rencana yang baik dan diikuti dengan tindak lanjut dari implementasi kebijakan yang baik pula.¹⁶

Dari pernyataan tersebut bisa dikemukakan bahwa kenapa implemementasi tidak berjalan sesuai dengan harapan, karena rencana kebijakan yang diambil oleh

pemerintah daerah memang sudah bagus, tetapi tidak dibarengi dengan kebijakan sebagai tindak lanjut pasca penutupan lokalisasi tersebut. Sehingga pada akhirnya lokalisasi beroperasi kembali. Pada kenyataannya implementasi kebijakan Pondok Pesantren Ashri dalam hal penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) di Talangsari telah berjalan dengan kualifikasi kurang baik karena dalam merumuskan kebijakan tidak diawali dengan analisis kebutuhan, atau tidak dilakukan identifikasi masalah atau kebutuhan terlebih dahulu. Padahal hal itu merupakan keharusan dalam merumuskan kebijakan publik agar kebijakan yang dirumuskan dapat sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

Para ahli kebijakan publik yang mementingkan perlunya identifikasi kebijakan sebelum merumuskan kebijakan publik di antaranya William N. Dunn (2000) yang mengemukakan bahwa tahapan proses penyusunan kebijakan adalah: 1) Penyusunan Agenda, 2) Formulasi Kebijakan, 3) Adopsi Kebijakan, 4) Implementasi Kebijakan dan 5) Penilaian Kebijakan. Irfan Islami (1984) juga mengemukakan hal yang senada di mana tahapan kebijakan publik meliputi: 1) Perumusan Masalah, 2) penyusunan Agenda, 3) Penyusunan Usulan, 4) Pelaksana Kebijakan, dan 5) Penilaian Pelaksana Kebijakan.

Dengan alasan tersebut di atas wajar saja jika implementasi kebijakan Pondok Pesantren Ashri dalam hal penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) di Talangsari tidak berjalan dengan baik. Dan apabila dikaitkan dengan pendapat George Edward III (1980) sangat logis jika implementasi kebijakan Pondok Pesantren Ashri dalam hal penolakan berdirinya *hypermarket* (Giant) di Talangsari kurang baik, sebab hanya didukung oleh faktor komunikasi, tetapi kurang didukung oleh

¹⁶ Mohamad Sobary, *Kesalahan dan Tingkah Laku Ekonomi*. (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999), hal. 11.

faktor sumber-sumber, disposisi atau kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Pondok Pesantren Ashri Talangsari telah berjalan dengan kualifikasi kurang baik. Hal itu didasarkan pada fenomena bahwa banyak terjadi benturan antara pondok pesantren, masyarakat yang pro maupun kontra, juga dengan dinas terkait dan juga banyak mengandung muatan politik dalam menyelesaikan konflik penolakan tersebut.
2. Ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pondok Pesantren Ashri Talangsari ternyata banyak faktor yang tidak mendukung implementasi kebijakan penolakan berdirinya *hypermarket* yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Ashri Talangsari, dan lingkungan masyarakat pun juga kurang mendukung sehingga kualifikasinya kurang baik. Oleh karena itu wajar jika implementasi kebijakan penolakan berdirinya *hypermarket* yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Ashri Talangsari tidak berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan dkk. (ed.). 2008. *Agama, Pendidikan Islam, dan Tanggungjawab Sosial Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dhofier, Zamahsyari. 1994. *Tradisi Pesantren*. Jakarta : LP3ES.
- Edwards. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT Harindita
- Khusnuridlo. 2006. *Manajemen Pondok Pesantren dalam Pesppektif Global*. Yogyakarta: Laksbang

- Mastuhu. 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Ciputat : INIS
- Molcong, Lexy. 2006. *metode penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Suharto, Babun. 2011. *Dari Pesantren Untuk Umat*. IMTIYAZ. Surabaya.
- Sobary, Mohamad. 1999. *Kesalahan dan Tingkah Laku Ekonomi*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Weber, Max. 2003. *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme* (Yusup Priyasudiarja. Terjemahan). [t.k.]. Pustaka Prometheus.